

## PERGOLAKAN DI ETHIOPIA

Kirdi DIPOYUDO

### Pengantar

Dalam suatu kudeta tak berdarah pada tanggal 12 September 1974, Angkatan Bersenjata Ethiopia di bawah suatu komite koordinasi memberhentikan Kaisar Haile Selassie dan mengambil alih kekuasaan. Kudeta ini adalah puncak suatu gerakan yang dimulai enam bulan sebelumnya ketika Angkatan Bersenjata melancarkan demonstrasi-demonstrasi untuk menuntut kenaikan gaji, penggantian pemerintah dan pembaharuan-pembaharuan. Walaupun Kaisar memberikan konsesi-konsesi, gerakan itu secara berangsur-angsur ditingkatkan. Secara berturut-turut Angkatan Bersenjata menangkap menteri-menteri dan pejabat-pejabat tinggi yang dituduh melalaikan tugas, menyalahweng dan melakukan korupsi, membubarkan lembaga-lembaga kekuasaan kekaisaran, menasionalisir istana-istana, tanah dan perusahaan-perusahaan Kaisar dan akhirnya menurunkannya dari takhta, membubarkan kedua majelis parlemen dan membekukan konstitusi. Setelah mengambil alih kekuasaan Angkatan Bersenjata mulai melakukan pembaharuan-pembaharuan dan dalam rangka itu menunjuk suatu komite untuk menyiapkan suatu konstitusi baru sebagai dasar dan kerangka hukum orde baru yang diperjoangkannya dan yang berkisar pada demokrasi dan keadilan sosial.

Tulisan ini bermaksud menganalisa pergolakan itu dan secara berturut-turut membahas faktor-faktor yang telah mendorong perwira muda yang merupakan otak dan dalang gerakan Angkatan Bersenjata itu untuk bertindak, maksud tindakan-tindakan mereka, tugas yang mereka hadapi untuk menyelesaikan perjuangan mereka, masalah-masalah yang mempersulit tugas itu dan prospek perjuangan mereka itu.

### 1. Faktor-faktor Gerakan Angkatan Bersenjata

Berbagai faktor telah mendorong Angkatan Bersenjata Ethiopia untuk melancarkan kampanye yang mencapai puncaknya dalam penggulingan Kaisar Haile Selassie itu. Salah satu yang penting ialah

sifat otoriter dan represif rejim yang berkuasa. Di atas kertas sejak tahun 1930 Ethiopia adalah suatu kerajaan konstitusional di mana kekuasaan Kaisar sebagai Kepala Eksekutif dibatasi dan diimbangi oleh parlemen yang terdiri atas dua majelis dan suatu lembaga kehakiman yang bebas. Akan tetapi kenyataannya rejim Ethiopia adalah suatu diktatur yang ketat dan represif. Kaisar memerintah sebagai seorang otokrat dengan kekuasaan tak terbatas. Dia mengangkat dan memberhentikan Perdana Menteri dan Menteri lain-lain sesuai dengan kemauannya dan mempunyai kekuasaan luas dalam pemerintahan, Dewan Perwakilan dan Senat, kedua majelis parlemen, tidak banyak berarti dan hampir semata-mata berfungsi sebagai penasihat Kaisar dan pengesah keputusan-keputusannya. Kekuatan-kekuatan politik sebenarnya ialah angkatan bersenjata, kaum bangsawan yang hampir semuanya tuan tanah dan gereja Koptis yang juga memiliki tanah yang luas. Kaisar mengawasi ketiga kekuatan itu dan berusaha memelihara keseimbangan antara mereka. Untuk mencegah salah satu mendapatkan terlalu banyak kekuasaan, dia memusatkan kekuasaan di tangannya sendiri dan secara teratur mengadakan perputaran penjabat-penjabat yang menduduki posisi-posisi kunci. Dalam sistem kekuasaan itu tiada tempat bagi partai-partai politik dan mereka yang mengecam kebijaksanaan pemerintah dan membahayakan kedudukannya ditahan<sup>1</sup>. Salah satu tuntutan angkatan bersenjata ialah pembebasan tahanan-tahanan politik dan kebebasan politik bagi rakyat.

Faktor penting lain ialah susunan feodal masyarakat di mana kaum bangsawan menduduki tempat-tempat penting dalam pemerintahan dan memiliki sebagian besar tanah. Mereka memperlakukan para petani yang menggarap tanah mereka sebagai bawahan yang harus melayani mereka. Dua pertiga hasil tanah, harus diserahkan kepada mereka. Sebagai akibatnya para petani hidup dalam keadaan serba kekurangan biarpun giat bekerja, sedangkan tuan-tuan tanah menjadi kaya<sup>2</sup>. Untuk mempertahankan kedudukan yang istimewa itu dan kekuasaan mereka atas para petani, kebanyakan tuan tanah itu memiliki laskar-laskar bersenjata. Sehubungan dengan itu Komite Koordinasi Angkatan Bersenjata menuntut agar diadakan land reform.

Faktor ketiga ialah aparat pemerintah yang lemah dan kurang mampu, disebabkan oleh adanya fragmentasi fungsi antara berbagai departemen dan lembaga, duplikasi pekerjaan dan konsentrasi

<sup>1</sup>Cf. "The Lion caged", dalam Newsweek, 26 Agustus 1974, hal. 22; "Ethiopia", dalam Encyclopaedia Americana (New York, 1971), X, hal. 546.

<sup>2</sup>Cf. "Unhappy peasants", dalam Newsweek, 8 April 1974, hal. 22.

jabatan-jabatan penting pada orang-orang tertentu. Sebagai akibatnya tiada koordinasi yang baik dan efisiensi berkurang. Selain itu ketidamampuan, semangat dan sikap pegawai negeri umumnya kurang menunjang pembangunan ekonomi. Kebanyakan mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan negara dan masyarakat, sehingga banyak terjadi penyalahgunaan wewenang dan kedudukan, dan korupsi merajalela<sup>1</sup>. Sesuai dengan alam feodal rakyat dianggap sebagai barang yang dapat diperbudak dan diperas, dan milik negara diperlakukan sebagai milik pribadi. Secara demikian kekayaan menumpuk di tangan sedikit orang dan perbedaan antara kaya dan miskin sangat menyolok. Sehubungan dengan itu angkatan bersenjata menuntut agar korupsi diberantas sampai akar-akarnya dan para pejabat yang korup dijatuhi hukuman yang berat.

Dengan demikian pemerintah kurang mampu menjalankan tugasnya menajukan kesejahteraan umum, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan prasarana. Pendidikan masih sangat terbatas. Lebih dari 90% penduduk masih buta huruf dan di segala bidang terdapat suatu kekurangan tenaga terdidik pada semua tingkat. Kebanyakan pegawai negeri tidak memiliki kecakapan untuk menjalankan roda pemerintahan negara dan pembangunan yang diperlukan untuk memperbaiki tingkat hidup rakyat<sup>2</sup>.

Faktor lain ialah kegagalan pemerintah untuk menghadapi bencana kekeringan yang lama dan banyak minta korban pada tahun 1971. Berjuta-juta ekor ternak mati, panen gagal sehingga pangan menjadi masalah, dan sekitar 100.000 orang meninggal karena kelaparan sebelum kabinet mengambil langkah-langkah untuk menghadapinya<sup>3</sup>. Akan tetapi langkah-langkah itu sangat kurang memadai, tidak hanya karena sukarnya pengangkutan bantuan pangan ke daerah-daerah bencana, tetapi juga karena kurangnya rasa tanggung jawab pejabat-pejabat dan petugas-petugas yang bersangkutan. Banyak bantuan luar negeri tidak pernah sampai pada orang-orang yang dimaksud tetapi menghilang di tengah jalan. Juga atas desakan kaum cendekiawan dan mahasiswa-mahasiswa yang sangat tidak puas dengan ketidakefektifan dan inefisiensi yang banyak minta korban itu, Komite Koordinasi menuntut agar para pejabat yang bertanggung jawab diajukan ke muka pengadilan.

<sup>1</sup> Cf. "The non-coup coup", Newsweek, 15 Juli 1974, hal. 18; Detlev Karsten, "Ethiopia. Economy", dalam Africa South of the Sahara 1972 (London, 1972), hal. 283-293, khususnya hal. 289.

<sup>2</sup> Cf. Detlev Karsten, "Ethiopia. Economy", ibid. hal. 288.

<sup>3</sup> Cf. "The Lion at bay", dalam Newsweek, 11 Maret 1974, hal. 12.

Faktor kelima ialah mengganasnya inflasi sebagai akibat gagalnya panen karena kekeringan tersebut dan melonjaknya harga minyak. Harga barang-barang keperluan hidup meningkat dan pemerintah ternyata tidak mampu menolkannya<sup>1</sup>. Maka timbullah amarah dan kekecewaan di kalangan rakyat. Karenanya dikemukakan tuntutan supaya harga-harga diturunkan.

Mengingat sistim pemerintahan yang berlaku, pada analisa terakhir Kaisarlah yang dianggap bertanggung jawab dan kenyataannya dia disalahkan sebagai faktor utama kepincangan-kepincangan sosial tersebut. Dia disalahkan tidak berbuat apa-apa untuk mengatasi masalah-masalah itu dan membiarkan pejabat-pejabat menyalahgunakan kekuasaan dan melakukan korupsi besar-besaran secara yang sangat merugikan negara dan rakyat<sup>2</sup>. Selain itu dia juga dituduh telah memperkaya diri dengan uang negara dan menyimpannya di bank-bank di Swis. Menurut perkiraan sementara orang jumlahnya mencapai \$10 milyar, suatu jumlah yang luar biasa. Komite Koordinasi minta kepadanya agar menarik jumlah itu dan menyerahkannya kepada negara. Penolakannya merupakan salah satu alasan mengapa dia diturunkan dari takhta<sup>3</sup>. Menggelapkan uang negara dan menyimpannya di luar negeri, padahal uang itu sangat dibutuhkan untuk pembangunan dalam negeri, dilihat sebagai suatu tindakan kriminal yang serius. Kenyataannya praktik itu, yang tidak hanya dilakukan oleh Kaisar tetapi juga oleh banyak pejabatnya, adalah salah satu penyebab kemiskinan dan keterbelakangan Ethiopia, yang mengakibatkan penderitaan berjuta-juta orang rakyatnya.

Akhirnya perlu disebutkan demonstrasi-demonstrasi yang makin banyak dilancarkan mahasiswa-mahasiswa, kaum buruh dan golongan-golongan lain untuk memprotes kepincangan-kepincangan sosial tersebut dan menuntut perbaikan-perbaikan. Semuanya itu ikut memperkuat keyakinan perwira-perwira muda yang memimpin gerakan angkatan bersenjata itu bahwa diperlukan perubahan-perubahan dan mendorong mereka untuk bertindak dan melancarkan kampanye mereka<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup>Cf. "The non-coup coup", Dalam Newsweek, 15 Juli 1974, hal. 18.

<sup>2</sup>Cf. "Ethiopia", dalam Encyclopaedia Americana, X, hal. 546; "Time catches up with the Old Lion", dalam Newsweek, 23 September 1974, hal. 22-23.

<sup>3</sup>Cf. "Time catches up with the Old Lion", ibid. hal. 27; berita Reuter yang dimuat Antara, 12 September 1974.

<sup>4</sup>Cf. "The Lion at bay", dalam Newsweek, 11 Maret 1974, hal. 12.

2. Maksud Gerakan Angkatan Bersenjata

Dari tuntutan-tuntutan yang diajukan kepada Kaisar<sup>1</sup>, dan tindakan-tindakan yang diambil oleh angkatan bersenjata dapat disimpulkan, bahwa maksud kampanye itu bukanlah semata-mata kenaikan gaji dan perbaikan nasib ataupun penggantian pemerintah, penarikan, penahanan dan pengadilan penjabat-penjabat yang menyelamatkan atau melalaikan tugasnya, melainkan perubahan-perubahan radikal baik dalam masyarakat maupun dalam hidup kenegaraan. Berdasarkan alasan, bahwa orde yang ada busuk sampai akar-akarnya dan tidak dapat diperbaiki secara tambal sulam, kampanye mereka bertujuan untuk menjebol orde lama itu dan menggantinya dengan orde baru yang menjamin hak-hak azasi, termasuk kebebasan-kebebasan, dan keadilan sosial.

Dalam rangka itu Kaisar Haile Selassie dipaksa turun takhta tidak hanya karena kesalahan-kesalahan dan kegagalannya menghentikan inflasi, salah urus pemerintah, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di kalangan penjabat-penjabat, meningkatnya pengangguran dan lain sebagainya, melainkan juga sebagai penghambat perubahan-perubahan radikal yang perlu untuk memperbaiki masyarakat dan meningkatkan taraf hidup rakyat.

Dengan demikian yang dimaksud dan diperjuangkan Komite Koordinasi Angkatan Bersenjata pada dasarnya adalah suatu revolusi, suatu perubahan mendalam dalam pemerintahan dan masyarakat dalam waktu singkat<sup>2</sup>. Bukan hanya perbaikan tambal sulam, tetapi perubahan-perubahan total yang mendalam. Orde lama harus ditumbangkan dan orde baru dibangun sebagai gantinya. Akan tetapi revolusi ini berbeda dengan revolusi-revolusi lainnya dalam arti bahwa revolusi ini dilakukan tahap demi tahap secara sistimatis di mana setiap tahap menyiapkan tahap berikutnya, sampai akhirnya kekuasaan tertinggi ditumbangkan<sup>3</sup>.

Angkatan Bersenjata bertindak secara berhati-hati dan tahap demi tahap karena menyadari bahwa mereka menghadapi perlawanan kuat dari kekuatan-kekuatan politik lainnya, yaitu kaum bangsawan dan pemimpin-pemimpin gereja yang sebagai golongan vested interest

<sup>1</sup>Or. "Kericuhan di Ethiopia", Antara, 28 Maret 1974; "The Lion of Judah", Antara, 26 Agustus 1974, hal. 23.

<sup>2</sup>Or. "More Trouble ahead", dalam Newsweek, 18 Maret 1974, hal. 43.

<sup>3</sup>Or. "Time catches up with the Old Lion", dalam Newsweek, 23 September 1974, hal. 27; "Six months crisis in Ethiopia ends", laporan UPI yang terjemah di Indonesian Observer, 14 September 1974.

Berkopentingan dengan kelangsungan sistim feodal dan oleh sebab itu akan berusaha menggagalkan setiap usaha untuk menghancurkan sistim itu<sup>1</sup>. Seperti diketahui, mereka itu merupakan suatu kekuatan yang besar, tidak hanya karena mempunyai kedudukan penting dalam pemerintahan dan masyarakat, tetapi juga karena kebanyakan memiliki iaskar-laskar bersenjata. Lagi pula rakyat yang menghormati Kaisar sebagai seorang dewa dan loyal secara mutlak kepadanya harus diciptakan secara psikologis lebih dahulu. Tanpa persiapan semacam itu mereka akan mudah dibakar untuk melawan suatu pemberontakan yang ditujukan terhadap Kaisar<sup>2</sup>. Sikap berhati-hati dan pentahanan itu kenyataannya merupakan salah satu faktor suksesnya. Kudeta berhasil tanpa pertumpahan darah dan rakyat tidak hanya tidak memberikan perlawanan, tetapi juga menyambutnya dengan gembira setelah diyakinkan bahwa sumber penderitaan mereka adalah pemerintah dan Kaisar. Selanjutnya rakyat menaruh harapan akan perbaikan-perbaikan atas Angkatan Bersenjata, khususnya Komite Koordinasi yang menjadi otak dan dalang revolusi itu.

Pada tahap terakhir Komite Koordinasi mengambil alih kekuasaan sepenuhnya, memberhentikan Kaisar, membubarkan parlemen yang tidak dipilih rakyat secara demokratis dan yang sejauh itu sangat mengecewakan, membekukan konstitusi yang merupakan dasar hukum orde lama, dan membentuk suatu rejim militer sementara yang bertugas untuk menyelesaikan pembersihan aparatur pemerintah dan menyiapkan lahirnya orde baru<sup>3</sup>. Sehubungan dengan itu Komite Koordinasi membentuk suatu komisi penasihat sipil untuk menyusun rancangan konstitusi baru dan menetapkan suatu prosedur bagi pembentukan suatu pemerintah sipil yang pada waktunya akan menggantikan pemerintah militer sementara.

### 3. Revolusi Ethiopia belum selesai

Sejauh ini kampanye Angkatan Bersenjata berjalan dengan lancar dan berhasil baik. Pemerintah lama yang tidak mampu diberhentikan dan diganti dengan suatu pemerintah sementara yang menyiapkan penyusunan orde baru. Penjabat-penjabat yang menyeleweng dan menyalahgunakan kedudukan serta kekuasaan tanpa pandang bulu ditangkap dan ditahan untuk diadili. Korupsi yang selama ini merupakan

<sup>1</sup> Cf. "More trouble ahead", dalam Newsweek, 18 Maret 1974, hal. 12.

<sup>2</sup> Cf. "The Lion caged", Newsweek, 26 Agustus 1974, hal. 22.

<sup>3</sup> Cf. Antara, 12 dan 13 September 1974.

<sup>4</sup> Cf. Laporan AFP yang dimuat Antara, 23 September 1974.

salah satu penyakit Ethiopia yang parah sedang dalam proses perkebabiasaan. Parlemen dibubarkan, konstitusi dibekukan dan Kaisar Haile Selassie diberhentikan dan ditahan sebagai orang yang pada akhirnya terakhir bertanggung jawab atas kepincangan-kepincangan sosial negeri.

Akan tetapi semuanya itu baru sebagian maksud kampanye Angkatan bersenjata. Revolusi Ethiopia belum berakhir. Perjuangan rakyat harus diteruskan untuk membangun orde baru yang meliputi pelaksanaan cita-cita demokrasi dan keadilan sosial<sup>1</sup>. Dalam rangka itu inflasi yang mengganas harus dikendalikan dan perekonomian dibangkitkan dengan mengerahkan segala tenaga dan dana yang tersedia. Penanaman modal baik dalam negeri maupun asing harus digalakkan, dan uang negara yang diselewengkan dan disimpan di bank-bank luar negeri ditarik kembali. Sejalan dengan pembangunan ekonomi itu kekayaan negara harus dibagi kembali secara yang wajar lewat suatu land reform, perbaikan sistim perpajakan, sistim pengupahan dan penggajian, perbaikan dan perluasan fasilitas-fasilitas pendidikan, kesehatan, perhubungan dan pengangkutan, dinas sosial dan lain sebagainya<sup>2</sup>.

Selain itu diperlukan suatu kerangka pemerintahan demokratis yang dapat menjamin hak-hak azasi, termasuk kebebasan-kebebasan, dan terwujudnya kesejahteraan umum. Dengan maksud itu Komite Koordinasi memperjuangkan suatu sistim kerajaan konstitusional yang demokratis, di mana rakyat leluasa mendirikan partai-partai politik dan lewat partai-partai itu ikut serta dalam pemerintahan negara. Secara konkrit sasaran perjuangannya ialah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan adalah pada parlemen, yang dipilih rakyat secara demokratis, sedangkan raja hanya berfungsi sebagai kepala negara dan lambang persatuan<sup>3</sup>.

Dengan demikian rejim militer yang berkuasa di Ethiopia sekarang ini menghadapi suatu tugas yang sangat berat, terutama karena negara itu menderita kekurangan dana dan tenaga yang diperlukan untuk pembangunan<sup>4</sup>. Pertama-tama, Ethiopia adalah salah satu negara yang miskin dan terbelakang di Afrika. Kebanyakan penduduknya, sekitar 80%, masih hidup dari pertanian subsistensi dan banyak yang mengenal ekonomi uang. Pendapatan per jiwa masih rendah,

<sup>1</sup> Cf. "More trouble ahead", Newsweek, 18 Maret 1974, hal. 12.

<sup>2</sup> Cf. Laporan AFP yang dikutip Antara, 27 Maret 1974.

<sup>3</sup> Cf. Berita BBC, 15 September 1974; "Time catches up with the U.S. Lion", Newsweek, 23 September 1974, hal. 22.

<sup>4</sup> Cf. Detlev Karsten, "Ethiopia. Economy", dalam Africa South of the Sahara 1972, hal. 289.

tidak melebihi \$50 setahun. Produksi mineralnya belum banyak dan perdagangan luar negerinya masih berkisar pada satu hasil pertanahan, yaitu kopi yang merupakan 2/3 volume ekspor. Walaupun potensi ekonominya besar dalam arti bahwa sekitar 70% tanahnya dapat diletakkan dan airnya berlimpah-limpah, Ethiopia tidak mempunyai dana dan keahlian yang diperlukan untuk pembangunannya dalam jumlah yang mencukupi<sup>1</sup>.

Taraf pendidikan rakyat masih rendah. Lebih dari 90% penduduk masih buta huruf (1971) dan fasilitas-fasilitas pendidikan sangat terbatas. Pada tahun 1967 hanya 11% anak usia SD bersekolah. Sebagai salah satu akibatnya Ethiopia kekurangan tenaga kerja terdidik pada segala tingkat<sup>2</sup>.

Ethiopia juga masih terbelakang dalam bidang prasarana. Walaupun terdapat dinas bus antara Addis Ababa dan ibukota-ibukota propinsi, perhubungan dan pengangkutan tidak begitu lancar. Seluruh negeri baru memiliki sekitar 8.000 km jalan baik dan 23.400 km jalan kurang baik<sup>3</sup>. Kurangnya prasarana ini menghambat pembangunan ekonomi.

Hambatan lain yang penting ialah sistem pemilikan tanah feodal di mana kebanyakan petani tidak mempunyai hak milik atas tanah yang digarapnya. Komite Koordinasi merencanakan suatu land reform agar para petani memiliki tanah yang digarapnya dan secara demikian mampu memperbaiki nasib mereka, akan tetapi pelaksanaannya tidak akan mudah. Kaum bangsawan dan gereja yang selama ini memiliki sebagian besar tanah tidak akan membiarkan perubahan sistem pemilikan tanah yang menguntungkan mereka tanpa memberikan perlawanan. Lagi pula banyak petani belum mampu memanfaatkan keuntungan yang akan mereka peroleh dari land reform itu. Selain belum mengenal cara-cara pertanian modern yang menjamin tingkat produksi yang lebih tinggi, mereka juga tidak memiliki modal seperlunya untuk mengolah tanah mereka secara optimal. Sehubungan dengan itu pemerintah harus memberikan banyak bantuan berupa kredit, penyuluhan dan bimbingan.

Kesukaran lain datang dari mahasiswa-mahasiswa yang mengadakan demonstrasi dan menuntut kepada Angkatan Bersenjata agar segera mungkin menyerahkan kekuasaan kepada suatu pemerintah sipil. Komite Koordinasi sebelumnya memberikan janji akan mengadakan pemilihan

<sup>1</sup>Cf. Detlev Karsten, "Ethiopia. Economy", *ibid.* hal. 288-292.

<sup>2</sup>Cf. Detlev Karsten, "Ethiopia. Economy", *ibid.* hal. 288.

<sup>3</sup>Cf. Detlev Karsten, "Ethiopia. Economy", *ibid.* hal. 289.



umum dan menyerahkan kekuasaan kepada parlemen yang akan dibentuk sebagai hasilnya, akan tetapi para mahasiswa meragukan kejujurannya dan khawatir rejim militer tidak akan melepaskan kekuasaan yang telah diperolehnya<sup>1</sup>. Sebagai akibatnya timbulah suatu ketegangan yang dapat meruncing menjadi suatu konfrontasi antara kedua golongan yang telah bekerja sama untuk menumbangkan orde lama.

Akhirnya rejim baru menghadapi gerakan separatis Eritrea, yang dilancarkan Front Pembebasan Eritrea sejak tahun 1963 ketika rejim lama membubarkan federasi Ethiopia-Eritrea dan merubah status Eritrea menjadi salah satu propinsi Ethiopia. Gerakan itu memperjuangkan kemerdekaan, yang berarti pemisahan dari Ethiopia, dan tidak akan berhenti sebelum berhasil, biarpun menyatakan bersedia mengadakan perundingan-perundingan dengan pemerintah Ethiopia di bawah pengawasan PBB<sup>2</sup>.

#### 4. Prospek Revolusi Ethiopia

Pada waktu sekarang ini keadaan di Ethiopia belum begitu jelas, sehingga kita sukar mengatakan apakah Angkatan Bersenjata akan berhasil menyelesaikan revolusinya dengan baik. Akan tetapi ada beberapa hal yang dapat menjadi petunjuk. Pertama-tama adalah perwira-perwira muda yang menjadi otak dan dalang gerakan Angkatan Bersenjata. Mereka ini tidak hanya memperhatikan soal-soal militer, tetapi juga banyak menaruh perhatian atas soal-soal ideologi dan politik. Slogan mereka ialah Ethiopia dahulu, demokrasi, kesempatan yang sama, pemberantasan korupsi dan feodalisme, modernisasi, keadilan sosial dan lain sebagainya. Karena tidak berasal dari kalangan bangsawan dan penjabat-penjabat tinggi pemerintah, mereka tidak mempunyai komitmen terhadap establishment dan oleh sebab itu lebih terbuka untuk gagasan-gagasan tersebut. Mereka juga tidak mempunyai tradisi militer dari ayah ke anak, antara lain karena dipaksa masuk Akademi Militer di Harrar untuk mengisi kekurangan sukarelawan.

---

<sup>1</sup> Cf. Laporan AFP yang dimuat dalam Indonesian Observer, 21 September 1974.

<sup>2</sup> Cf. Jean de La Guérivière, "Ethiopian Crisis. Eritrean threat of secession", The New Standard, 28 September 1974, yang mengutipnya dari Le Monde.

Dengan demikian mereka mudah mengambil tindakan terhadap atasan mereka yang menyeleweng, termasuk panglima-panglima mereka<sup>1</sup>.

Kejadian-kejadian selama ini menunjukkan, bahwa perwira-perwira muda itu adalah orang-orang idealis yang selain keberanian dan keuletan juga memiliki kebijaksanaan dan perhitungan. Walaupun menghadapi banyak kesukaran, mereka berhasil mengambil alih kekuasaan tanpa pertumpahan darah dan dalam proses itu juga berhasil menggalang persatuan yang cukup kompak dalam tubuh Angkatan Bersenjata dan mendapatkan dukungan luas di kalangan rakyat, yang memperkuat kedudukan mereka<sup>2</sup>. Dari penangkapan-penangkapan yang dilakukan selama ini dapat disimpulkan bahwa mereka benar-benar bermaksud membersihkan negara dari penguasa-penguasa dan penjabat-penjabat yang melalaikan tugas, menyalahgunakan kekuasaan dan melakukan korupsi. Dapat diperkirakan, bahwa mereka akan mengganti penjabat-penjabat itu dengan orang-orang yang kompeten dan bersih, sehingga lambat laun akan tercipta suatu aparat pemerintah yang efisien.

Demonstrasi-demonstrasi yang baru-baru ini dilancarkan oleh mahasiswa-mahasiswa dan serikat-serikat buruh kiranya tidak akan berkombang menjadi suatu konfrontasi yang akan menghambat penyusunan orde baru. Perbedaan pendapat antara mereka dan Angkatan Bersenjata tidak mengenal prinsip, tetapi semata-mata soal waktu. Setelah demonstrasi-demonstrasi itu Komite Koordinasi mengulangi janjinya akan menyerahkan kekuasaan kepada parlemen yang akan dipilih rakyat secara demokratis<sup>3</sup>. Regim militer tidak bermaksud berkuasa untuk selama-lamanya akan tetapi memerlukan waktu untuk mengidentifikasi dan menyingkirkan pendukung-pendukung regim lama dan untuk menetapkan suatu prosedur bagi rakyat untuk memilih wakil-wakil yang akan merumuskan bentuk pemerintahan demokratis. Rupanya perwira-perwira muda itu menyadari bahwa selama ini regim-regim militer di berbagai negara Afrika tidak mampu memecahkan masalah pembangunan ekonomi yang dapat menjamin suatu kemakmuran yang merata, dan bahwa dari segi lain regim-regim militer itu umumnya merupakan suatu kemunduran karena menghambat pembangunan demokrasi perwakilan.

<sup>1</sup> Cf. Alan Rake, "Ethiopia near a final military takeover", Gemini, yang dimuat dalam The Indonesian Times, 30 Agustus 1974; "Army mutiny in Ethiopia", UPI, yang dimuat dalam Indonesian Observer, 1 Juli 1974.

<sup>2</sup> Cf. "Time catches up with the Old Lion", Newsweek, 23 September 1974, hal. 22.

<sup>3</sup> Cf. Berita AFP yang dimuat dalam Indonesian Observer, 21 September 1974.

Kaisar Haile Selassie telah berkali-kali berjanji akan mengadakan land reform dan empat tahun yang lalu mengajukan suatu rancangan undang-undang kepada parlemen, tetapi rancangan itu tidak pernah disahkan, terutama karena perlawanan tuan-tuan tanah<sup>1</sup>. Angkatan Bersenjata kiranya akan lebih berhasil dalam hal ini karena telah dapat mematahkan kekuasaan tuan-tuan tanah itu. Lagi pula mereka menyadari bahwa sistim pemilikan tanah feodal itu merupakan salah satu penghambat utama kemajuan dan pembaharuan.

Kebutuhan akan uang untuk membiayai program-program pembangunan tersebut untuk sebagian kiranya akan dapat ditutup dengan bantuan luar negeri yang dapat diperkirakan akan meningkat apabila rejim militer berhasil membangun demokrasi dan menciptakan suatu aparat pemerintah yang kompeten dan bersih. Dalam keadaan semacam itu penanaman modal asing juga akan meningkat.

Dalam politik luar negeri rejim baru itu kiranya tidak akan banyak menjumpai kesukaran untuk melaksanakan programnya yang tidak banyak berbeda dengan program rejim lama, yaitu tidak memihak dalam permusuhan blok-blok, mentaati Piagam PBB dan GAU serta menghormati kewajiban-kewajiban internasional atas dasar saling menghormati dan persamaan derajat, membantu gerakan-gerakan kemerdekaan dan perjuangan untuk mengakhiri kolonialisme, dan memelihara hubungan baik dengan negara-negara Afrika lainnya, terutama Somalia dan Kenya<sup>2</sup>.

Perebutan kekuasaan yang terjadi dalam tubuh Dewan Militer dan berakhir dengan tersingkirnya dan tertembak matinya Jendral Andom, yang sejak kudeta tanggal 12 September 1974 memegang jabatan Ketua Dewan Militer, Kepala Pemerintah Sementara merangkap Menteri Pertahanan dan Kepala Negara, dan pembunuhan tanpa proses hukum 5 orang tokoh terkemuka orde lama yang ditahan sejak beberapa waktu, termasuk dua orang bekas Perdana Menteri, sejumlah Menteri, 18 orang Jendral, bekas Panglima AL, dan 2 orang anggota Komite Koordinasi, rupanya tidak akan menyelewengkan jalannya revolusi. Semuanya itu hanya menunjukkan, bahwa kelompok Mayor Mengistu Haile Miriam yang mengikuti garis keras tampil kemuka sebagai pemenang dan menjadi dominan. Dengan perkataan lain, semuanya itu hanya berarti suatu radikalisasi rejim militer dan revolusi Ethiopia. Mungkin bahkan dapat dikatakan, bahwa dengan tersingkirnya kelompok Jendral Andom revolusi Ethiopia kembali pada garis semulanya yang radikal. Jendral Andom bukan anggota Komite Koordinasi yang sejak permulaan merupakan otak dan dalang revolusi itu.

<sup>1</sup>Cf. "Unhappy peasants", Newsweek, 8 April 1974, hal. 22.

<sup>2</sup>Cf. Laporan AP dalam The New Standard, 13 September 1974.

Dengan demikian dapat diperkirakan, bahwa revolusi Ethiopia akan berjalan terus, tetapi selanjutnya akan menempuh jalan keras sesuai dengan sasaran-sasarannya, yaitu perubahan-perubahan yang radikal dalam masyarakat dan pemerintahan. Dengan perkataan lain, rejim militer akan meneruskan usahanya untuk menenyapkan sisa-sisa orde orde lama, memberantas penyakit-penyakit sosial yang telah mendorong perwira-perwira muda untuk melancarkan kudeta, dan untuk membangun suatu orde baru sebagai gantinya, akan tetapi dengan cara-cara revolusioner, tanpa banyak kompromi. Dari lain pihak adanya kecaman opini dunia dan campur tangan PBB akan ikut mencegah terjadinya ekses-ekses seperti penembakan mati tahanan-tahanan tanpa proses pengadilan yang wajar.

Dalam rangka itu pembaharuan-pembaharuan yang telah dijanjikan akan dilakukan secara konsekwen. Pemerintahan otoriter pada waktunya akan diganti dengan suatu pemerintahan demokratis yang menjunjung tinggi hak-hak azasi, dan susunan feodal masyarakat diganti dengan suatu susunan baru yang mencerminkan persamaan hakiki semua warganegara dan keadilan sosial. Penjabat-penjabat yang korup, melalaikan tugas dan menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi akan diadili dan dijatuhi hukuman yang setimpal. Tempat mereka akan diisi dengan orang-orang yang tidak hanya kompeten tetapi juga dedicated dan bersih. Dengan suatu aparat yang terdiri atas penjabat-penjabat semacam itu, Pemerintah Ethiopia akan mampu mengerahkan tenaga dan dana yang tersedia untuk pembangunan demi perbaikan nasib rakyat. Termasuk kekayaan yang dikumpulkan Haile Selassie dan disimpannya di berbagai bank di Swis, yang kiranya akan dapat ditarik kembali dengan surat kuasanya. Menurut Newsweek kekayaan itu adalah sebesar \$250 juta dan menurut BBC bahkan \$1.500 juta.

Akan tetapi semuanya itu didasarkan atas asumsi, bahkan Komite Koordinasi menepati janjinya untuk pada waktunya menyerahkan kekuasaan kepada suatu pemerintah sipil yang dipilih rakyat secara demokratis dalam suatu pemilihan yang bebas. Apabila sebaliknya Komite mengingkari janjinya itu dan dengan bermacam-macam dalih berusaha untuk tetap berkuasa, keadaan orde lama akan kembali dan pada waktunya akan terjadi suatu kudeta baru yang akan menumbangkannya. Suatu pemerintah otoriter yang menginjak-injak hak-hak azasi, khususnya kemerdekaan, dan keadilan sosial tidak akan dapat bertahan selamanya. Hak-hak azasi dan keadilan sosial adalah aspirasi manusia yang paling dalam dan paling kuat dan oleh sebab itu tidak dapat diperkosa untuk jangka waktu yang panjang, terutama apabila rakyat telah sadar akan hak-haknya. Maka seperti di banyak

negara Afrika lainnya akan terjadilah bahwa kudeta yang satu akan disusul kudeta yang lain tanpa membawa perbaikan nasib rakyat. Kemungkinan itu adalah riil, akan tetapi kiranya tidak akan menjadi kenyataan, tidak hanya karena para mahasiswa dan kalangan masyarakat lain-lain akan menentangnya tetapi juga karena Komite Koordinasi terdiri atas perwira-perwira muda yang dikenal sebagai kaum idealis yang dengan jujur mencita-citakan demokrasi, hak-hak azasi, persamaan kesempatan, keadilan sosial dan lain sebagainya.

Sebagai kesimpulan dapat dikatakan, bahwa rejim militer sementara Ethiopia menghadapi suatu tugas yang sangat berat, terutama karena kekurangan dana dan tenaga terdidik yang diperlukan, akan tetapi mempunyai suatu peluang yang baik untuk menyelesaikan revolusinya dengan hasil yang baik.

### Kesimpulan

Pergolakan yang terjadi di Ethiopia selama ini pada dasarnya adalah suatu revolusi, suatu perubahan radikal dalam masyarakat dan hidup kenegaraan dalam waktu yang cukup singkat. Angkatan Bersenjata di bawah pimpinan Komite Koordinasi yang terdiri atas perwira-perwira muda melancarkan gerakannya itu dengan maksud untuk merombak orde lama yang berkisar pada rejim otoriter Kaisar Haile Selassie yang sewenang-wenang dan susunan feodal masyarakat dan sebagai gantinya menyusun suatu orde baru atas dasar demokrasi, hak-hak azasi termasuk kebebasan-kebebasan dan keadilan sosial.

Berlainan dengan revolusi-revolusi lainnya, revolusi di Ethiopia itu dilaksanakan secara sistematis menurut suatu pentahapan di mana setiap tahap menyiapkan tahap berikutnya. Walaupun sasaran utama ialah Kaisar Haile Selassie sendiri, Angkatan Bersenjata Baru mengambil tindakan terhadapnya dan menurunkannya dari takhta setelah menyingkirkan pembantu-pembantunya, menghancurkan loyalitas rakyat terhadapnya, membuat kaum bangsawan yang mendukungnya tidak berdaya dan membubarkan lembaga-lembaga yang digunakannya untuk melaksanakan kekuasaannya. Ciri lain ialah peranan yang dimainkan perwira-perwira muda yang menjadi otak dan dalang revolusi itu. Mereka mengambil alih kekuasaan tetapi menyatakan hanya akan berkuasa untuk sementara sebagai pemerintah transisi yang bertugas untuk menyusun orde baru dan sesudah itu akan menyerahkan kekuasaan kepada orang-orang sipil yang akan dipilih rakyat secara demokratis.

Setelah berhasil menumbangkan orde lama dan mengambil alih kekuasaan, Angkatan Bersenjata meletakkan dasar-dasar orde baru sambil meneruskan pembersihan sisa-sisa orde lama, termasuk peradilan, penjabat-penjabat yang ditahan atas tuduhan melalaikan tugas, menyalahwewenang dan melakukan korupsi. Regim baru segera mengambil tindakan-tindakan untuk mengatasi kepincangan-kepincangan sosial yang telah mendorong Angkatan Bersenjata untuk melancarkan geraknya seperti inflasi, pengangguran, korupsi, sistem pemilikan tanah feodal yang mengandung suatu pemerasan terhadap petani-petani penggarap tanah. Pada waktu yang sama pemerintah mulai melaksanakan pembaharuan-pembaharuan dan perbaikan-perbaikan dalam bidang administrasi, pendidikan, kesehatan, perburuhan, perpajakan, dan lain sebagainya. Tahanan-tahanan politik dibebaskan dan kepada rakyat diberikan kebebasan-kebebasan. Sebagai dasar dan kerangka hukum semuanya itu disiapkan suatu konstitusi baru yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi, hak-hak azasi dan keadilan sosial. Pada waktunya akan diadakan pemilihan umum di mana rakyat akan dapat memilih suatu parlemen yang pada gilirannya akan memilih suatu pemerintah baru.

Usaha-usaha untuk menyusun orde baru itu terbentur pada kekurangan prasarana, dana dan tenaga terdidik pada segala tingkat. Dengan demikian tugas Angkatan Bersenjata untuk menyelesaikan revolusi yang telah dimulainya itu menjadi sangat berat dan sulit. Namun regim militer mempunyai peluang yang cukup baik. Pertama-tama, pimpinan revolusi adalah di tangan perwira-perwira muda, yang tidak hanya idealis dan mencita-citakan demokrasi, kesempatan yang sama bagi semua, pemberantasan feodalisme dan korupsi, modernisasi dan keadilan sosial, tetapi juga memiliki keberanian dan kebijaksanaan. Selain itu mereka berhasil menciptakan suatu kekompakan dalam tubuh angkatan bersenjata dan mendapatkan dukungan luas di kalangan rakyat. Dengan demikian kedudukan mereka menjadi lebih kuat, sehingga mampu menjamin kestabilan dan melaksanakan program mereka. Dibutuhkan akan dana-dana untuk sebagian kiranya akan dapat ditutup dengan bantuan luar negeri yang diperkirakan akan mengalir setelah menjadi jelas bahwa mereka benar-benar memperjuangkan demokrasi dan keadilan sosial. Secara demikian mereka juga akan dapat menggalakkan penanaman modal asing untuk mengolah kekayaan alam yang selama ini belum dimanfaatkan sepenuhnya.

Namun tetap terbuka kemungkinan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi itu tidak membawa perbaikan-perbaikan yang diharapkan rakyat. Salah satu syarat utama agar revolusi itu dapat diselesaikan dengan baik ialah adanya suatu pemerintah yang benar-benar demokratis dan terdiri atas orang-orang yang tidak hanya kompeten tetapi juga dedicated dan bersih. Apabila perwira-perwira muda tersebut menegang janjinya untuk pada waktunya menyerahkan kekuasaan kepada orang-orang semacam itu dan membatasi diri untuk menjamin keamanan, kestabilan dan percaturan politik yang wajar, maka sukses revolusi di Ethiopia itu akan lebih terjamin.





Pergolakan masyarakat-masyarakat di Afrika bagian Selatan Sahara tidak dapat dilepaskan dari kondisi rakyat yang untuk 90% lebih hidup dalam taraf subsistensi sebagai akibat pengembangan ekonomi kolonial yang amat pincang. Dalam periode pra-kemerdekaan, penguasa-penguasa kolonial sebenarnya sudah mulai melaksanakan proyek-proyek pertanian, seperti proyek penanaman kacang tanah di bagian Perancis dan di Tanganyika, untuk keperluan kebutuhan akan minyak kacang. Proyek-proyek ini merupakan proyek raksasa dengan alat-alat mekanisasi besar. Misalnya di Tanganyika untuk proyek ini sudah diinvest sebanyak 80 juta dollar, namun ternyata bahwa perencanaan kurang mencakup faktor-faktor iklim, tenaga kerja, baik karena kurang skilled, maupun karena masih hidup sebagai pengembara (nomads), sehingga uang banyak tadi sudah hilang tanpa bekas. Di daerah Perancis proyek ini disebut groundnut scheme dan ditoritikan kepada Office di Niger, tetapi investasi sebanyak 200 juta dollar sudah hilang, dan proyek dihentikan.

Dalam sektor perkebunan di daerah Anglo-phone yaitu bekas-bekas koloni Inggris, hanya dua daerah dipandang baik untuk settlement orang putih, ialah Kenya dan Rhodesia. Pada tahun 1950, di Kenya terdapat 7.000 ha yang digarap oleh perkebunan-perkebunan putih. Dengan meletusnya pemberontakan Mau-Mau pada tahun 1953 Jomo Kenyatta sebagai pemimpin suku Kikuyu dibuang ke Kepulauan Seychelles, kemudian dengan kemerdekaan pada tahun 1964 dengan Jomo Kenyatta sebagai Presiden pertama, maka kebanyakan orang putih ingin menjual perkebunan-perkebunannya, karena takut kemungkinan gejolak-gejolak orang hitam. Ternyata bahwa Kenyatta sebagai Presiden dapat meyakinkan pemerintah Inggris bahwa peralihan perkebunan dari tangan putih ke tangan hitam tidak akan merugikan kepentingan Inggris. Maka sejak tahun 1970 pemerintah Inggris memberi bantuan kepada Kenya untuk membayar kompensasi pada pengusaha-pengusaha Inggris. Dengan politik ekonomi yang sukses tadi, dengan infra-struktur kekuasaan dalam tangan suku Kikuyu, diperkuat dengan adanya satu batalyon tentara Inggris, yang melakukan "latihan" terus-menerus, maka Kenya di mata orang Barat merupakan sukses.

Di negara-negara Franco-phone, yakni bekas-bekas koloni Perancis pada umumnya ikatan dengan Perancis tetap dipelihara, baik di bidang ekonomi, politik, pertahanan maupun kebudayaan. Kurikulum sekolah-sekolah di negara-negara Franco-phone tetap menggunakan buku-buku Perancis yang dicetak di Perancis. Benar-benar penghasil devisa untuk Perancis yang tidak dapat diabaikan. Di